

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra AdityaBakti, Bandar Lampung, 2004.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Ahmad Muhtadi Rangkuti, *Ekosistem Pesisir dan Laut Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Ambo Tuwo, *Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut*, Brilian Internasional, Sidoarjo, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- _____, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali pers, Jakarta, 2014.
- Arif Zulkifli, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Erwin, *Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-Undangan*, UBB Press, Pangkalpinang, 2010.
- Hamzah Halim & Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2009

- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Husain Latuconsina, *Ekologi Perairan Tropis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2004.
- Jum Anggriani, *Hukum Adminsitrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- LA. Sara, *Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Mohamad Soerjani, Dkk, *Lingkungan Hidup Pendidikan, Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yayasan Institusi Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan, Jakarta, 2006.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Rokhmin Dahuri, dkk, *Pengelolaan Sumber daya Pesisir Secara Terpadu*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Setyo Utomo dan Dwi Haryadi, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Danadyaksa, Yogyakarta, 2013.
- Sirajuddin, dkk, *Hukum administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Sulistiyowati Iriyanto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Yahya Ahmad. Dkk, *Legislative Drafting (Perancangan Perundang-Undangan)*, Thafa Media, Jakarta, 2016.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

2. Jurnal

Abdul Rokhim, *Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, No. 36, Vol XIX, Malang, 2013.

Ali Marwan HSB & Evlyn Martha Julianthy, *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, No. 2, Vol 15, Sumatera Utara, 2018.

Ananda Prima Yurista dan Dian Agung Wicaksono, *Kompabilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai Rencana Tata Ruang yang Integratif*, dalam Jurnal Hukum, No 9, Vol 6 2017.

Ali Marwan HSB dan Evlyn Martha Julianty, *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, No 2, Vol 15 2018.

Cekli Setya Pratiwi, *Model Pembentukan Peraturan Daerah Responsif dan Berdimensi Hak Asasi (Analisa Muatan Materi Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan Di Indonesia)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 11 No. 3, September 2014.

- Dayanto, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Otonomi Daerah*, Vol. IX No. 2, Desember 2013.
- Dewi Kurniasih. Dkk, *Penyusunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1, Juni 2016.
- Dudung Abdullah, *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*, Jurnal Hukum Positum, Volume 1, Nomor 1, Desember 2016.
- Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, No. 3, Vol XXI, Tulungagung, 2016.
- Florentinus Christian Imanuel, *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara*, eJournal Ilmu Pemerintahan, No. 2, Vol 3, Kalimantan, 2015.
- Lidya Agustina, *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor*, Jurnal Akuntansi, No.1, Vol 1, Jakarta, 2009.
- Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.
- Muhtadi, *Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013.
- Mutiawanthi, *Tantangan “Role”/ Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, Jakarta, 2017.
- Nurliana Br Siregar, *Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, dalam Jurnal Hukum JOM, No. 1, Vol 2, Pekanbaru, 2015.
- Suaib, *Pembentukan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah*, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 7, Juli 2017.

Yerrico Kasworo, *Urgensi Penyusunan Pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, dalam Jurnal Hukum, 2017.

Zainal Arifin Hoesein, *Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 1, No.3, Surakarta, 2012.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil.

4. Media Internet (Website)

[Http://amp.kontan.co.id](http://amp.kontan.co.id)., *KKP target seluruh provinsi punya perda zonasi pesisir*.

[Http://bpptpm.babelprov.go.id](http://bpptpm.babelprov.go.id)., *Sektor pertambangan*.

[Https://customslawyer.wordpress.com](https://customslawyer.wordpress.com)., *Fokus Kajian Teori Kewenangan*.

[Http://www.didisadili.com](http://www.didisadili.com)., *Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) harus disusun dengan basis data yang Akurat*.

[Http://maritim.go.id](http://maritim.go.id)., *Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Harus Segera Selesai*.

[Http://www.neraca.co.id](http://www.neraca.co.id)., *Pentingnya Pemda Miliki Perda Zona Kelautan.*

[Http://setkab.go.id](http://setkab.go.id)., *RZWP3K Kepastian Hukum Bagi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.*

5. Wawancara

Hasil wawancara bersama Ibu Yuyun selaku Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Raperda RZWP-3-K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Jumat, 29 Maret 2019.

Hasil wawancara bersama Bapak Kristianti, A.PI., selaku Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Raperda RZWP-3-K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Jumat, 29 Maret 2019.

Hasil wawancara bersama Bapak Rudi, SE., M.SI. Kepala Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Selasa, 26 Maret 2019.

Hasil wawancara bersama Bapak Try Muharman, S.H. Kepala Subbagian Peraturan Daerah Pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Selasa, 27 Juni 2019.

6. Sumber Lainnya

Dokumen Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017.

Dokumen Antara *Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tahun Anggaran 2018.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3K Provinsi*, 2013.

Kementerian Kelautan dan Perikanan *Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3K Kabupaten/Kota*, 2013.